



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/135 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
b. bahwa Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom).
c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama Pejabat tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - q. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - r. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bertanggung jawab kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA.....

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Semarang

pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN :

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, Msi NIP. 19661129 199203 1 005 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI I. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH III. KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH IV. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENGAWAJAN PERANGKAT DAERAH V. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH VI. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH VII. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH VIII. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2	IWAN BUDIANTO, ST,MT NIP. 19740515 199803 1 011 Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BIDANG RANCANG BANGUN DAN PENGAWASAN I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
3	AGUS APRYANTO, ST, MT NIP. 19690425 199603 1 002 Kepala Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Timur	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH TIMUR I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
4	WAHYUTORO SOETARNO, ST,MT NIP. 19680720 199803 1 004 Kepala Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Barat	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Barat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH BARAT I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
5	INDRARTO WIDYATMOKO, ST, MT NIP. 19691024 199603 1 004 Kepala Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Bangunan Gedung	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Sarana Prasarana Perumahan dan Bangunan Gedung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM I. KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH I. KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK REGIONAL

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
1	2	3	4
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG I. KEGIATAN PENETAPAN DAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA AHLI KONSTRUKSI II. KEGIATAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) CAKUPAN DAERAH PROVINSI III. KEGIATAN KESLIJAKAN KHUSUS TERHADAP PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH SEMARANG I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH SEMARANG I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH PATI I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH PATI I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH PURWODADI I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH PURWODADI I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH SURAKARTA I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
6	Dr. Ir. AR. HANUNG TRYONO, Msi NIP. 19661129 199203 1 005 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	
7	API DIANA PRASETIYA, ST, MT NIP. 19751106 200604 1 002 Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	
8	BINAWAN NUR TJAHJONO, SE, MM NIP. 19710710 199208 1 001 Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	
9	ADI PRASETYA, ST NIP. 19780414 200903 1 009 Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEUDUDUKAN	KEGIATAN
1	2	3	4
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH SURABAYA I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
10	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, Msi NIP. 19661129 199203 1 005 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH MAGELANG I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH MAGELANG I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
11	DEWA PUJI SANTOSA, ST NIP. 19750212 200710 1 003 Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH WONOSOBO I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH WONOSOBO I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
12	TEGUH IMAN PRIYANTO, S.Sos, M.Si NIP. 19490919 199203 1 008 Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH CILACAP I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH CILACAP I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
13	TEGUH DWI HARYANTO, ST, MT NIP. 19760127 200112 1 002 Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH TEGAL I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH TEGAL I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
14	Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, Msi NIP. 19661129 199203 1 005 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI BPJ WILAYAH PEKALONGAN I. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH II. KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH III. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BPJ WILAYAH PEKALONGAN I. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

No	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KEGIATAN
1	2	3	4
15	RITA AGUS SETYORINI, ST, MT NIP. 19790324 200604 2 029 Kepala Balai Pengujian dan Peralatan	Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengujian dan Peralatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1. KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN BALAI PENGUJIAN DAN PERALATAN 1. KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI

KEPALA DINAS PERENCANAAN UMUM BINA MARGA
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

